

IMPLIKASI KEBIJAKAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN TERHADAP PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA

Ramot Sipayung *
Prof. Dr. Marzuki, S.H., M.Hum **
Adil Akhyar, S.H., L.LM, Ph.D **

ABSTRAK

Keberadaan regulasi lingkungan hidup menjadi landasan hukum bagi masyarakat Indonesia dan pemerintah untuk dapat melaksanakan pemanfaatan sumber daya alam tanpa mengorbankan lingkungan demi ekonomi.

Permasalahan yang dibahas, yaitu bentuk penyederhanaan prosedur perizinan berusaha menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, dampak penyederhanaan prosedur perizinan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 terhadap persetujuan lingkungan, dan implikasi hukum persetujuan lingkungan sebagai model perizinan usaha dalam upaya perlindungan lingkungan hidup.

Metode penelitian yang digunakan adalah *deskriptif analitis*, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, alat pengumpulan data penelitian yang digunakan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Analisis data yang digunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif-analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk penyederhanaan prosedur perizinan berusaha menurut UU Cipta Kerja melalui perubahan izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan yang mana menjadi syarat untuk terbitnya perizinan berusaha melalui sistem *Online Single Submission*-RBA. Penyederhanaan prosedur perizinan terhadap persetujuan lingkungan membawa pelemahan instrument lingkungan hidup, seperti pembatasan partisipasi masyarakat dalam proses Amdal, penghapusan klausul pengajuan keberatan terhadap proses Amdal, ketidakjelasan kedudukan persetujuan lingkungan sebagai objek sengketa TUN. Implikasi hukum persetujuan lingkungan sebagai model perizinan usaha dalam upaya perlindungan lingkungan hidup adalah pelemahan izin lingkungan, amdal hanya menjadi dasar pertimbangan, melemahkan partisipasi masyarakat, melemahkan penegakan hukum, menderegulasi peraturan daerah terkait lingkungan hidup.

Kata Kunci : Implikasi, Persetujuan Lingkungan, Cipta Kerja

* Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

** Dosen Pembimbing

**IMPLICATIONS OF ENVIRONMENTAL APPROVAL POLICY ON
ENVIRONMENTAL PROTECTION IN INDONESIA BASED ON LAW
NUMBER 6 OF 2023 CONCERNING JOB COPYRIGHT**

Ramot Sipayung *
Prof. Dr. Marzuki, S.H., M.Hum **
Adil Akhyar, S.H., L.LM, Ph.D **

ABSTRACT

The existence of environmental regulations provides a legal basis for the Indonesian people and government to be able to utilize natural resources without sacrificing the environment for the sake of the economy.

The issues discussed are the form of simplification of business licensing procedures according to Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation, the impact of simplification of licensing procedures in Law Number 6 of 2023 on environmental approvals, and the legal implications of environmental approvals as a model for business licensing in efforts to protect environment.

The research method used is descriptive analytical, the type of research used in this research is normative juridical, the research data collection tool used is Library Research. Data analysis used qualitative methods which produced descriptive-analytical data.

The results of the research show that a form of simplifying business licensing procedures according to the Job Creation Law is through changing environmental permits to environmental approvals which are a requirement for the issuance of business permits through the Online Single Submission-RBA system. The simplification of licensing procedures for environmental approvals has led to the weakening of environmental instruments, such as limiting public participation in the Amdal process, eliminating clauses for submitting objections to the Amdal process, unclear position of environmental approvals as an object of TUN disputes. The legal implications of environmental approval as a model for business licensing in environmental protection efforts are weakening environmental permits, AMDAL only becoming a basis for consideration, weakening community participation, weakening law enforcement, deregulating regional regulations related to the environment.

Keywords: *Implications, Environmental Agreement, Job Creation*

* Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

** Dosen Pembimbing